

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terdapat konsep yang dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencerminkan kerja sama sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rukayat, 2021). Dampak adanya tata kelola pemerintahan yang baik adalah terwujudnya stabilitas nasional dengan pemerataan pembangunan di seluruh bagian wilayah negara, termasuk entitas terkecil yakni desa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, hal ini tercermin dalam kemampuan desa untuk menginisiasi proses pembangunan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Utami, 2019). Salah satu strategi nyata yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah melalui optimalisasi aset desa untuk pengembangan sektor pariwisata, sebagaimana terlihat dalam upaya pembentukan desa wisata.

Menurut Riyanto (2019), tata kelola pemerintah yang efektif dapat mempengaruhi pembangunan pariwisata di suatu negara. Pembangunan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar, khususnya dalam perkembangan perekonomian (Lili & Lasso, 2020). Berdasarkan laporan *Tourism Trends and Policies 2022* oleh OECD (*Organization for Economic Co-Operation and*

Development), menyatakan bahwa sektor pariwisata pada tahun 2019 menyumbang 5,0% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Purwowidhu, 2023). Salah satu program dalam pembangunan sektor pariwisata ialah dengan mendorong pengembangan desa wisata. Menurut Suryo (2018), setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari pemerintah tertarik untuk mengembangkan desa wisata, yaitu:

1. Sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sebagian besar memiliki Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
2. Perubahan *trend* wisatawan dunia menyebabkan sektor pariwisata harus menghargai dan melestarikan adat istiadat lokal. Kekhasan masing-masing daerah dapat menjadi sumber utama daya tarik wisatawan domestik maupun asing sehingga perlu adanya fasilitasi dan peningkatan daya saing Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) daerah pedesaan.
3. Perkembangan destinasi wisata sangat bergantung pada kontribusi masyarakat lokal. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing wisata sebagai produk unggulan kepariwisataan dalam negeri, yang juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan

ada istiadat desa. Oleh sebab itu, penting untuk disadari bahwa dalam proses pembangunan desa, masyarakat lokal tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Utami, 2019). Dengan demikian, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah supaya menciptakan kemandirian, berpikir inovatif dan kreatif, serta memiliki inisiatif tinggi untuk berperan dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep pengembangan desa wisata berbasis komunitas (masyarakat), yang dikenal dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT).

CBT merupakan pemberdayaan desa wisata berbasis masyarakat, karena dalam kegiatan pariwisata daerah, masyarakat lokal ditempatkan sebagai pihak yang memainkan peran utama (Tamianingsih & Eprilianto, 2022). Dengan mengimplementasikan konsep CBT maka pengembangan dan pemberdayaan desa wisata di Indonesia diharapkan berjalan secara berkelanjutan dan dinamis (Febriandhika & Teguh 2019). Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjaga kontinuitas dan pengembangan desa wisata sekaligus sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, hingga kini, terdapat asumsi yang menunjukkan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam inisiatif pengembangan desa wisata termasuk dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Batang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki 32 desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Pandansari di Kecamatan Warungasem. Desa Wisata Pandansari atau dikenal juga dengan sebutan “Desa Wisata

Pandansari” merupakan desa wisata hasil buatan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam berupa aliran Sungai Kupang yang terdapat di Desa Pandansari. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut menciptakan daya tarik wisata seperti Tubing Pandansari, Arum Jeram, *Camping Ground* dan *Outbond*. Inisiatif pengembangan Desa Wisata Pandansari pertama kali digagas oleh sekelompok masyarakat lokal yang tergabung dalam komunitas “KOPAL ETOM” (Kelompok Pecinta Alam Enak Tentrem Ora Mendem) sejak tahun 2013 silam. Pengelolaan Desa Wisata Pandansari oleh Kopal Etom bertujuan untuk mengelola potensi alam secara berkelanjutan, melestarikan lingkungan, dan menyediakan ruang bagi generasi muda di desa untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam bidang sosial ekonomi, budaya, maupun pariwisata (Kopal Etom, 2021).

Nurhidayati dan Fandeli menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya di sekitar kawasan wisata, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sehingga manfaatnya juga ditujukan bagi masyarakat setempat (Prakoso,dkk., 2020). Dalam konteks Desa Wisata Pandansari, konsep ini sebenarnya telah diterapkan sejak awal, diketahui dari pengelolaan Desa Wisata Pandansari yang berada di bawah komunitas masyarakat dan kelompok sadar wisata. Kondisi ini mengakibatkan adanya keterbatasan dalam penyediaan fasilitas wisata maupun dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Wildan (2022) mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Pandansari belum memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Desa Wisata Pandansari. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah desa memiliki peran

strategis dalam pengelolaan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional (Suprpto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengelola desa wisata, pemerintah desa dan daerah, serta pihak swasta untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Desa Wisata Pandansari diketahui telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora), serta pihak swasta seperti PLN. Namun, hingga kini, kontribusi nyata dari Pemerintah Desa Pandansari dalam pengembangan desa wisata belum terlihat secara jelas.

Berdasarkan kondisi yang ada di Desa Wisata Pandansari, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa Pandansari maupun pemerintah Kabupaten Batang dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mewujudkan Desa Wisata Pandansari yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata untuk mewujudkan konsep *Community Based Tourism* di Desa Wisata Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata untuk mewujudkan konsep *Community Based Tourism* di Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, atau informasi mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan desa wisata untuk mewujudkan *Community Based Tourism* (CBT). Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial khususnya dalam kajian ilmu pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang peran pemerintah dalam pemberdayaan desa wisata untuk mewujudkan *Community Based Tourism*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan saran bagi pemerintah khususnya di level pemerintahan Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata. Selain itu diharapkan juga pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/desa dapat mengimplementasikan *Community Based Tourism* (CBT) dengan lebih baik, khususnya dalam pemberdayaan dan pengembangan objek wisata di desa wisata.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan maupun wawasan untuk masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan *Community Based Tourism* (CBT). Selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan yang suatu saat melakukan

penelitian dengan topik yang serupa sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, informasi bagi peneliti baik secara teori maupun praktis. Selain itu, peneliti juga berharap pengalaman dalam penelitian ini mampu bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan peneliti.

1.5 Literatur Review

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan acuan oleh peneliti, adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Farhah Kamilatun Nuha pada tahun 2022, berjudul “Peran Pemerintah Gampong dalam Pengembangan Desa Wisata di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar”. Dengan menerapkan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Gampong dalam pengembangan desa wisata telah berupaya menciptakan desa wisata berbasis masyarakat. Jika dilihat dari tiga indikator peran pemerintah desa sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, maka peran pemerintah Gampong dianggap sudah mencapai hasil yang baik, namun belum dikatakan maksimal. Saran dan harapan dari penelitian ini adalah, Pemerintah Gampong dapat lebih memahami dan mengamati ketiga indikator tersebut supaya dapat mengimplementasikannya dengan lebih baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Susi Iswanti dan Zulkarnaini pada tahun 2022 dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantai Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa dalam pengembangan objek wisata Pulau Tilan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan, yaitu peran pemerintah desa sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, peran pemerintah desa belum mencapai tingkat optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya hambatan seperti kurangnya modal dalam mengembangkan objek wisata, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan objek wisata.

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian terletak pada topik yang diangkat, yakni peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata yang mengacu pada tiga indikator peran pemerintah menurut Pitana dan Gayantri dalam buku Sosiologi Pariwisata tahun 2005. Penelitian ini memiliki persamaan untuk meneliti peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Meskipun memiliki persamaan yang mengacu pada indikator peran pemerintah yang digunakan, terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih terfokus pada peran pemerintah dalam memberdayakan desa wisata untuk mewujudkan *Community Based Tourism*. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat

bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis *Community Based Tourism*. Perlu dicatat bahwa lokasi penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu dilaksanakan di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Riski Windarsari dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) dan Pemberdayaan Potensi Pariwisata Lokal untuk Peluncuran Desa Wisata Kampung Kopi Sumberdem”. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya, disertai teknik pengumpulan data melalui observasi, diskusi formal, dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa implementasi konsep CBT di Kampung Kopi Sumberdem sudah berjalan baik dengan melibatkan banyak partisipasi masyarakat. Proses pemberdayaan desa wisata di Kampung Kopi Sumberdem terdiri dari tiga tahap, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan penyediaan data. Peneliti dalam penelitian tersebut merekomendasikan adanya strategi jangka panjang yang didasarkan pada analisis SWOT, yang berfokus pada optimalisasi keterlibatan masyarakat dan menjaga keberlangsungan desa wisata.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Usman, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pariwisata Model *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang”. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata di

Desa Pengudang dikembangkan oleh kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) yang terdiri dari lima kelompok yang terbentuk secara spontan tanpa adanya perencanaan yang terstruktur. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah desa dalam hal memotivasi, sosialisasi maupun penyediaan fasilitas umum, yang menyebabkan timbul masalah seperti pada bagian pemasaran dan permodalan.

Pada dua penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam mengembangkan maupun memberdayakan desa wisata untuk mewujudkan *Community Based Tourism*. *Community Based Tourism* dalam konteks pariwisata dikenal dengan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa wisata berbasis *Community Based Tourism*. Adapun perbedaannya terletak pada indikator peran pemerintah yang digunakan dan lokasi penelitian. Indikator peran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan peran pemerintah menurut Pitana dan Gayantri dalam buku Sosiologi Pariwisata tahun 2005, bahwa peran pemerintah dalam konteks pariwisata adalah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Sedangkan lokasi penelitian ini terletak pada desa wisata di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Peran Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “peran” diartikan sebagai seorang aktor dalam sandiwara (film), dan dianggap sebagai perilaku yang diharapkan dapat dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Makna peran menurut Edy Suhardono (1994) dalam penjelasan ilmu sosial diinterpretasikan sebagai fungsi yang terkait dengan individu ketika mengemban karakter tertentu dalam struktur sosial. Sedangkan Soejono Soekanto (2002) menyatakan, peran diartikan sebagai dimensi dinamis kedudukan (status), di mana seseorang dianggap menjalankan suatu peran ketika ia sedang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisi perannya tersebut. Dalam suatu organisasi maupun struktur sosial setiap individu tentu memiliki peran yang melibatkan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, peran dapat dianggap sebagai tingkah laku seseorang dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan posisi atau jabatan yang dimilikinya dalam struktur masyarakat. Syarat peran menurut Soejono Soekanto (2002), yaitu:

1. Peran melibatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam struktur masyarakat. Dalam hal ini, peran merupakan serangkaian regulasi yang memberikan panduan kepada individu dalam menjalani kehidupan sosial.
2. Peran merupakan perilaku yang dapat dijalankan oleh orang-orang dalam komunitas sebagai bagian dari organisasi.

3. Dalam struktur sosial masyarakat, peran diartikan sebagai bentuk tindakan perilaku individu.

Menurut Sondang P. Siagian (2009), peran pemerintah pada dasarnya muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pelayanan publik, perumusan jenis kebijakan, pengaturan, ketertiban umum dan keamanan, serta penegakan hukum. Sedangkan menurut Diatmika dan Rahayu (2022), peran pemerintah dianggap sebagai proses dalam menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung proses penanggulangan kemiskinan. Pemerintah selaku pilar utama dalam menjalankan urusan negara tentu memiliki beberapa tugas dan fungsi sesuai dengan lembaganya masing-masing. Untuk mengatur urusan pariwisata, pemerintah juga membentuk dan mengatur badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan wisata dalam negara, khususnya dalam hal pengembangan dan pemberdayaan potensi wisata. Adapun menurut Pitana dan Gayantri (2005), pemerintah berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya.

1. Peran pemerintah sebagai motivator, merujuk bahwa pemerintah harus mampu memberikan motivasi atau dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun sektor swasta yang hendak mendukung pariwisata di daerahnya, supaya dapat berjalan secara dinamis dan berkelanjutan.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator, mencakup penyediaan seluruh sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung pelaksanaan seluruh program pengelolaan wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah desa, maupun masyarakat. Dalam praktiknya, kolaborasi antara pemerintah, pihak

swasta dan masyarakat dapat dilibatkan untuk mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata.

3. Peran pemerintah sebagai dinamisator, dalam pilar *good governance*, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus dapat bekerja sama dengan baik secara optimal untuk mewujudkan pembangunan yang ideal. Pemerintah daerah selaku salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata berkewajiban melakukan sinergi terhadap ketiga pihak tersebut, dengan maksud untuk menciptakan hubungan simbiosis mutualisme untuk pertumbuhan pariwisata.

Adapun faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi keberhasilan organisasi wisata di suatu daerah secara signifikan menurut Oka A. Yoeti (2008), di antaranya:

1. Perluasan arus lalu lintas wisatawan yang berasal dari pusat–pusat pariwisata, menyebabkan kawasan tersebut tidak mampu menyediakan fasilitas yang nyaman dan memadai bagi pengunjung.
2. Industri pariwisata diharapkan dapat berperan sebagai katalisator pembangunan dan menghasilkan pendapatan bagi perekonomian daerah, dengan demikian penting untuk membentuk lembaga pengelola industri pariwisata yang handal.
3. Jumlah wisatawan meningkat pesat karena adanya kebutuhan pariwisata milik publik, sehingga penting untuk membentuk organisasi pariwisata yang mengembangkan layanan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah tertentu.

Ketiga faktor di atas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan fisik suatu kawasan wisata. Koordinasi antara organisasi pariwisata

dalam pengembangan fisik kawasan dan pengelola wilayah juga menjadi kebutuhan yang penting, untuk memastikan terjalannya pariwisata yang profesional dan menjamin kepuasan wisatawan terhadap kunjungannya (Yoeti, 2008). Dalam suatu kondisi, terkadang terdapat destinasi wisata di suatu daerah yang memiliki potensi yang istimewa, namun tidak dikelola dengan baik oleh organisasi pariwisata atau pemerintah sehingga menjadikan destinasi wisata tersebut kurang diminati wisatawan dan kurang memberikan manfaat bagi daerah tersebut sebagai tujuan wisata.

Melalui penjelasan tersebut, maka pemerintah desa dan kabupaten/kota memiliki peran penting untuk mengatur seluruh potensi dan sumber daya daerah, serta memastikan bahwa pemerintah sebagai katalisator pembangunan daerah dapat merealisasikan pembangunan melalui industri pariwisata untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk di daerah wisata tersebut. Teori peran pemerintah dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bentuk kontribusi maupun keterlibatan pelaku pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya ketika mengelola desa wisata untuk mewujudkan *Community Based Tourism* (CBT). Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengelolaan desa wisata di Desa Pandansari.

1.5.2.2 Pemberdayaan

Secara estimologis kata “pemberdayaan” menurut Keban dan Lele dalam (Wibowo & Mulyono, 2017) berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dalam kata Bahasa Inggris dikenal sebagai “*empowerment*” yang berarti sebagai “pemberian kekuasaan”, menunjukkan

bahwa konsep tersebut tidak hanya mencakup “daya” semata, tetapi juga melibatkan unsur “kekuasaan” (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Penggunaan kekuasaan tersebut bertujuan untuk mendukung individu dalam memperoleh kekuatan yang digunakan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Adapun menurut Nugroho (2021), pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok yang kurang berdaya (kekuasaan), khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada kondisi atau hasil yang diinginkan melalui perubahan sosial, yang mencakup menuju terciptanya masyarakat yang memiliki pengetahuan, kekuasaan, dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk yang bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial.

Dalam kondisi pembangunan saat ini, istilah pemberdayaan bukanlah sesuatu yang asing, terutama mengingat adanya pengakuan bahwa peran manusia memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembangunan (Maryani & Nainggolan, 2019). Pandangan ini menciptakan terbentuknya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam skala daerah maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memberdayakan masyarakat guna mencapai kerja sama untuk mewujudkan pembangunan yang telah diagendakan.

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat menurut Koentjaraningrat dalam (Sabtimarlia, 2015) berasal dari istilah bahasa Inggris “*society*” yang berasal dari bahasa Latin “*socius*”, yang

memiliki arti “kawan”. Menurut Linton dalam (Maryani & Nainggolan, 2019), masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian membentuk sistem yang memungkinkan mereka mengatur diri sendiri dan kelompok mereka sebagai entitas sosial yang utuh.

Pemberdayaan masyarakat menurut Diatmika dan Rahayu (2020) adalah tindakan yang diterima oleh masyarakat setempat dengan bertujuan untuk menjadikan mereka mandiri secara ekonomi. Menurut Maryani dan Nainggolan (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembangunan di mana dalam kegiatan sosialnya terdapat keterlibatan masyarakat yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, komponen utamanya terletak pada kemampuan masyarakatnya sendiri untuk berinisiatif dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, suksesnya kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh penyelenggaranya saja, melainkan sangat bergantung juga pada keterlibatan aktif dari pihak yang mendapatkan pemberdayaan, yaitu masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dalam situasi dan kondisi daripada sebelumnya.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996) dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat” karya Patilaila, dkk (2022), proses pemberdayaan memiliki dua aspek utama, yaitu primer dan sekunder. Secara primer, pemberdayaan menitikberatkan pada tindakan memberikan sebagian kekuasaan, maupun kemampuan kepada masyarakat supaya mereka menjadi lebih mandiri (berdaya). Sedangkan secara

sekunder, fokusnya lebih pada rangsangan atau motivasi terhadap individu supaya memiliki kemampuan atau kemandirian dalam menentukan pilihan hidupnya. Slamet (2003) mengatakan bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami, termotivasi, memanfaatkan peluang, mengambil risiko, bekerja sama, menangkap informasi, dan bertindak sesuai dengan situasi, konsep tersebut dikenal sebagai masyarakat berdaya (Patilaila, dkk, 2022). Maryani dan Nainggolan (2019) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tujuan adanya pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Bentuk perbaikan kelembagaan ditujukan untuk membenahi kelembagaan itu sendiri, termasuk dalam hal mengembangkan relasi kemitraan. Kelembagaan yang berkualitas adalah lembaga yang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang terarah. Dengan adanya kelembagaan yang berkualitas, maka mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas kelembagaan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelembagaan dapat beroperasi secara optimal dan berhasil mencapai tujuannya.

2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Adanya perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap usaha yang sedang berjalan. Kelembagaan yang beroperasi dengan optimal, menyebabkan usaha yang berkembang dapat beraktivitas dengan lebih baik. Oleh sebab itu, dapat memberikan kepuasan dan manfaat untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan, baik bagi anggota lembaga maupun masyarakat sekitarnya.

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan usaha menyebabkan meningkatnya kegiatan usaha, yang memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan seluruh anggota lembaga. Artinya, upaya perbaikan usaha diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan lembaga secara signifikan, termasuk peningkatan ekonomi yang diterima oleh keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Kerusakan lingkungan sering kali dipicu oleh tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila manusia memiliki kecerdasan, mereka seharusnya sadar dan cenderung tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peningkatan pendapatan dapat membawa dampak positif pada peningkatan kondisi lingkungan, baik segi fisik maupun sosial, karena sering kali kerusakan lingkungan diakibatkan kemiskinan (pendapatan yang terbatas).

5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Adanya peningkatan perbaikan dan lingkungan, maka berpengaruh pada meningkatnya standar kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Karena dengan pendapatan dan lingkungan yang baik, masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan lebih mudah sehingga kesejahteraan dalam masyarakat pun meningkat. Kesejahteraan ini dapat tercermin melalui adanya peningkatan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan atau daya beli.

6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Peningkatan kondisi lembaga, usaha, pendapatan, dan kualitas lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial, merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang baik, maka dapat berkontribusi pada peningkatan standar hidup di masyarakat secara keseluruhan sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan masyarakat mandiri dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah yang membantu dalam hal mendidik, melatih, maupun membina masyarakatnya secara bertahap dan berkelanjutan supaya mewujudkan masyarakat mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Menurut Maryani & Nainggolan (2019), terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

a) Prinsip Kesenjangan

Masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat memiliki posisi yang setara (sejajar). Dalam proses pengembangan pengetahuan, pengalaman, maupun keahlian, baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat memiliki kedudukan yang setara. Dalam proses ini, setiap peserta dapat saling memahami dan mengakui kelebihan serta kekurangan satu sama lain, yang menciptakan dinamika saling membantu, belajar, berbagi pengalaman dan dukungan.

b) Prinsip Partisipasi

Masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat diberi arahan yang jelas dari pihak penyelenggara supaya meningkatkan motivasi dalam diri masyarakat untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Dengan demikian, prinsip ini menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat harus mampu mendorong kemandirian masyarakat, yang melibatkan partisipatif mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Menekankan pada kemampuan masyarakat daripada pihak lain dan berperilaku selalu menghargai suatu hal. Pihak penyelenggara pemberdayaan masyarakat harus mengedepankan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, norma-norma masyarakat, sosial budaya yang sudah lama berkembang dalam ruang lingkup masyarakat tersebut.

d) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada masyarakat, yang selanjutnya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat tiga tahapan masyarakat menurut Wrihatnolo, dkk (2007) untuk mencapai masyarakat yang berdaya, yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, masyarakat diberi pencerahan atau pemahaman yang menegaskan eksistensi potensi dan kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat diberikan motivasi untuk memahami bahwa mereka harus bertindak supaya menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Dalam tahap ini, biasanya masyarakat mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait untuk mengawasi dan membantu proses penyadaran masyarakat.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan yang disebut juga dengan “*capacity building*” atau “*enabling*”, merupakan tahapan yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Terdapat tiga jenis proses pengkapasitasan dalam tahap ini, antara lain :

- 1) Pengkapasitasan manusia, berarti meningkatkan kemampuan manusia dalam konteks individu maupun kelompok dengan memberikan suatu pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, seminar, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan serta keterampilan masyarakat.
- 2) Pengkapasitasan organisasi, hal ini merujuk pada restrukturisasi organisasi yang hendak diberdayakan. Supaya tercipta manajemen organisasi yang lebih efisien dan inovatif.
- 3) Pengkapasitasan sistem nilai, atau dikenal dengan istilah “aturan main”, merujuk pada penetapan regulasi dalam suatu entitas organisasi yang harus

ditaati oleh setiap anggotanya dengan tujuan untuk memperkuat sistem nilai dan dapat mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, masyarakat diberikan peluang, kekuasaan, kekuatan, maupun otoritas yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Peluang ini berupa mengajak masyarakat untuk berperan lebih besar dengan ikut berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka, dengan memperhatikan akomodasi aspirasi serta dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan maupun aktivitas yang telah dilakukan.

Adanya pemberdayaan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk dapat berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Semakin mandiri masyarakatnya, maka semakin baik, karena dengan kemandirian masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan program, pelatihan, maupun penyuluhan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah, supaya dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat di atas, penelitian ini ditujukan untuk meneliti mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di desa wisata, khususnya Desa Pandansari supaya dapat mewujudkan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat (komunitas) atau *Community Based Tourism*.

1.5.2.3 Desa Wisata

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Setiap desa memiliki ciri khasnya tersendiri yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan lokal yang dimiliki. Oleh karena itu, penyebutan desa dapat beragam sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Adapun Desa Wisata menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 tahun 2019, menyebutkan bahwa: “Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu Kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.” Sedangkan menurut Wiendu dalam (Susfenti, 2016), desa wisata adalah penggabungan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dengan mempertahankan ciri khas maupun tradisi dalam struktur kehidupan masyarakat setempat.

Syarat utama menjadi desa wisata adalah memiliki potensi yang berasal dari keaslian desa itu sendiri yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata dan menghasilkan manfaat bagi daerahnya sendiri. Suprpto (2021) menyatakan bahwa syarat menjadi desa wisata menurut Syamsu dalam Prakoso terbagi menjadi empat, di antaranya:

1. Faktor kelangkaan, mengacu pada karakteristik daya tarik wisata yang tidak umum atau jarang ditemukan di lokasi lain.
2. Faktor alam, merujuk pada sifat tempat wisata yang tetap utuh tanpa mengalami perubahan akibat ulah dari manusia.
3. Faktor keunikan, menandakan karakteristik objek wisata yang berbeda dari lainnya, yang berfokus pada keunggulan komparatif yang dimiliki.
4. Faktor pemberdayaan masyarakat, adanya dorongan untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di daerahnya.

Desa wisata memiliki dua komponen utama yang harus dimiliki, yaitu:

1. Akomodasi. Berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang memadai seperti penginapan atau tempat tinggal, pelayanan makanan atau minuman, serta transportasi yang diperuntukkan kepada wisatawan. Adapun pelayanan penginapan yang ditujukan dapat berupa tempat tinggal penduduk lokal maupun konstruksi yang dibangun dengan tujuan sebagai tempat tinggal wisatawan.
2. Atraksi. Sebuah keunikan maupun karakteristik khas yang dimiliki oleh kawasan pedesaan, dapat dijadikan sebagai salah satu objek daya tarik wisatawan dengan memiliki nilai tersendiri karena menjadi ciri khas desa wisata tersebut. Memungkinkan juga terjadinya integrasi antara wisatawan sebagai partisipasi aktif dengan masyarakat lokal, seperti keikutsertaan wisatawan dalam kegiatan kursus tari, bahasa, membatik, maupun bermusik.

Tipologi desa wisata dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal, adalah desa wisata yang memiliki daya tarik utama wisatanya berupa adat istiadat, tradisi, budaya lokal, artefak, maupun kehidupan masyarakat lokalnya. Desa ini memperlihatkan kekhasan dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-harinya sebagai masyarakat pedesaan, termasuk dalam aktivitas religi, mata pencaharian, dan berbagai kegiatan lainnya.
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam, mengacu pada desa wisata yang berfokus pada pesona alam, seperti keindahan pegunungan, perkebunan, pertanian, maupun pesisir. Ciri khas desa ini terletak pada lokasinya yang cenderung berada di daerah pegunungan, pantai, sungai, lembah, dan berbagai bentang alam lainnya sehingga menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menarik minat pengunjung.
3. Desa wisata berbasis perpaduan antar keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama wisata. Desa ini terletak di wilayah yang memiliki keindahan alam dengan tradisi lokal dan gaya hidup masyarakatnya yang dipadukan sebagai objek wisata.
4. Desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif, merujuk pada desa wisata yang berfokus pada industri kreatif masyarakat lokal, yang berupa pembuatan berbagai kerajinan tangan dan seni lainnya. Desa ini menciptakan kekhasan dalam aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tangan tanpa kehilangan kearifan lokal dari pedesaan tersebut.

Terdapat faktor-faktor pendukung desa wisata yang dapat menciptakan desa wisata dari suatu kawasan pedesaan, yaitu:

1. Faktor kelangkaan, merujuk pada sifat daya tarik wisata di kawasan pedesaan yang tidak dapat ditemukan atau jarang ada di lokasi lain.
2. Faktor kealamiahannya, mengacu pada karakter atraksi wisata yang tetap konsisten sejak ditemukan dan tidak pernah mengalami perubahan yang disebabkan aktivitas manusia.
3. Faktor keunikan, mencirikan karakteristik atraksi wisata yang memiliki kelebihan relatif baik dibandingkan dengan objek wisata lainnya.
4. Faktor pemberdayaan masyarakat, mencerminkan kondisi di mana masyarakat diintensifkan untuk aktif terlibat dalam upaya pengelolaan dan pemberdayaan objek wisata di kawasan mereka

Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tercatat sebanyak 4.674 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2023 (Sutrisno, 2023). Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi pariwisata berbentuk desa wisata. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu program strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan program desa wisata tidak hanya bertujuan untuk menarik pengunjung wisata saja, tetapi juga untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam pengelolaan desa wisata. Kondisi tersebut diharapkan mampu

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelestarian budaya dan lingkungan lokal.

1.5.2.4 Community Based Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) menurut *ASEAN Community Based Tourism Standard* (2016), dapat didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam mengelola perkembangan wisata secara berkelanjutan, serta memenuhi harapan sosial terkait dengan aspek keamanan, ekonomi, sosial serta lingkungan. Denman (2001) menyatakan bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat lokal memainkan peran yang signifikan dalam keberlanjutan pariwisata, yaitu sebagai pemilik utama yang secara aktif terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata. (Prakoso,dkk.,2020).

Di sisi lain, Hausler (2005) mengemukakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang berpusat pada masyarakat setempat (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak), dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang mengarah pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam memastikan pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil kepada masyarakat setempat (Prakoso,dkk.,2020).

Suprpto (2021) menyatakan setidaknya ada tiga aktivitas pariwisata yang mendukung *Community Based Tourism*, di antaranya adalah wisata budaya (*cultural tourism*), penjelajah (*adventure travel*), dan ekowisata (*ecotourism*).

Fokus strategi dalam *Community Based Tourism* menitikberatkan pada pengidentifikasian aspirasi dan kapabilitas yang dimiliki oleh komunitas lokal dalam konteks pariwisata. Masyarakat lokal dipandu untuk memahami secara jelas tujuan mereka sendiri serta kemampuan yang dimiliki untuk mengelola sektor pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Melalui dorongan partisipasi yang aktif dari masyarakat lokal, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi kegiatan, konsep *Community Based Tourism* mampu menghasilkan industri pariwisata yang berkelanjutan. Karena alasan tersebut, konsep *Community Based Tourism* sering kali diadopsi di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Berikut ini adalah konsep yang digambarkan oleh Demartot :

Gambar 1.1 Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat Menurut Demartot



Sumber: Buku “Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata” oleh Suprpto (2021)

Melalui Konsep Demartot tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat lokal memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Di mana masyarakat sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, serta pemantau dan evaluasi proses pembangunan pariwisata. Suprpto

(2021) menyatakan dalam pengembangan konsep pariwisata berbasis masyarakat tersebut, terdapat beberapa kunci utama yang harus terpenuhi, seperti adanya dukungan dari pemerintah, partisipasi *stakeholder*, sistem pembagian keuntungan yang adil dalam komunitas, sistem penggunaan sumber daya lokal, pemberdayaan komunitas, serta kemampuan berjejaring.

Dalam proses mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat, terdapat tiga sistem yang perlu ditetapkan, antara lain:

1. Pengembangan sistem *sharing* dan kolaborasi informasi. Dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat perlu adanya kerja sama antara pihak masyarakat, pemerintah, serta industri pariwisata yang terintegrasi. Berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi untuk merencanakan kebijakan pengembangan pariwisata dengan langkah-langkah yang terorganisir.
2. Keuntungan kembali pada masyarakat. Sebesar apa pun keuntungan yang didapat dari aktivitas pariwisata harus kembali pada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya sistem penjamin bahwa keuntungan yang didapat pasti kembali pada masyarakat, hal ini bertujuan agar hak masyarakat sebagai penerima keuntungan terjamin dan masyarakat dapat menikmatinya.
3. Mampu mengombinasikan komponen lingkungan hidup, sumber daya, dan kepuasan pengunjung. Ketiga komponen tersebut harus dipantau secara teratur untuk menjaga keberlangsungannya. Dengan demikian apabila terdapat masalah dalam salah satu komponen dapat segera diketahui dan dicari solusinya, serta dapat segera mengembalikan keseimbangan rencana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* dapat membangun industri pariwisata yang berkelanjutan, dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan maupun dalam pemeliharaan pembangunan wisatanya. Untuk menyukseskan realisasi *Community Based Tourism*, masyarakat lokal sebagai objek utama harus diberdayakan oleh pemerintah terlebih dahulu. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Upaya pemberian pelatihan ini menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Selain itu, pemberian pelatihan dan penyuluhan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan pariwisata di daerahnya.

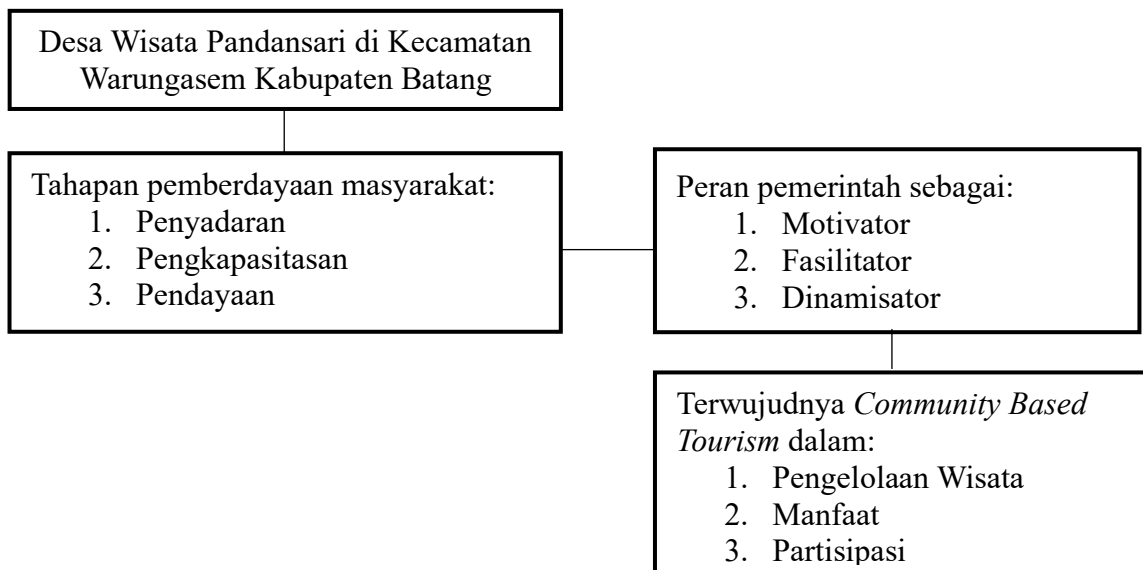
Melalui CBT ini diharapkan masyarakat dapat lebih partisipatif dalam mengelola maupun mengembangkan potensi pariwisatanya, terlebih lagi jika memiliki desa wisata di daerahnya. Menurut Tamir (2015) sebagaimana disajikan dalam artikel Febriandhika & Teguh (2019), berpendapat bahwa semakin banyak sektor pariwisata yang mengimplementasikan konsep berbasis masyarakat, maka tingkat komitmen terhadap pengembangan ekonomi pariwisata dalam proyek berjangka panjang juga menjadi meningkat. Meski fokus utamanya adalah peran masyarakat, namun supaya pariwisata berbasis masyarakat berhasil perlu adanya hubungan dengan sektor lainnya. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat dikelola secara terpisah tanpa intervensi dari sektor dan pemangku

kepentingan lainnya (The Mountains Insitute, 2000) sehingga perlu adanya kolaborasi dengan sektor lain, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pandansari untuk mewujudkan konsep *Community Based Tourism* (CBT), peneliti menggunakan tiga peran pemerintah berupa peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. *Community Based Tourism* dijadikan acuan dalam penelitian ini, sebab pemberdayaan desa wisata berbasis *Community Based Tourism* dapat mewujudkan desa wisata berkelanjutan, karena berfokus pada masyarakat yang berperan utama dalam pengembangan dan pemberdayaan desa wisata. Adanya *Community Based Tourism* maka pengembangan desa wisata dapat dikelola sesuai dengan kemampuan masyarakat lokal dan memberikan manfaat juga kepada masyarakat lokal tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan yang harus dilalui meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Untuk mewujudkan tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut, untuk menciptakan masyarakat dengan kesadaran tinggi sehingga mampu berkontribusi aktif menjadi bagian pengelola desa wisata, dibutuhkan adanya peran dari pemerintah. Pemerintah harus mampu berperan dalam memberdayakan masyarakat Desa Wisata Pandansari yang berdampak pada terwujudnya pengelolaan Desa Wisata Pandansari yang berkelanjutan sesuai dengan konsep *Community Based Tourism*.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui kualitas data dan tingkat keakuratan hasil penelitian, diperlukan adanya uji kredibilitas yang menekankan pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, validitas temuan data dianggap tercapai apabila hasil yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif bersifat kompleks, tidak bersifat tunggal, dan sangat tergantung pada konstruksi manusia. Untuk menguji kredibilitas, penelitian kualitatif dapat menggunakan triangulasi, yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, serta pada berbagai waktu.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode pendekatan penelitian kualitatif. John. W Creswell (2009) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan instrumen untuk memahami dan mengeksplorasi

makna dari suatu gejala sentral baik individu maupun kelompok dengan melakukan wawancara kepada partisipan, data yang didapat kemudian dianalisis dan diinterpretasi secara mendalam. Adapun analisis data yang sudah selesai, kemudian ditulis secara deskriptif yang memiliki struktur fleksibel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan studi penelitian, yang mencakup eksplorasi secara mendalam terhadap suatu peristiwa, aktivitas, proses, program, atau satu atau lebih individu. Studi penelitian ini memiliki batasan waktu dan aktivitas sehingga peneliti perlu mengumpulkan informasi secara detail dengan mengikuti prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang telah ditetapkan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang memberikan informasi atau keterangan kepada peneliti, sehingga peneliti mendapat informasi yang menjadi sumber data penelitian ini. Subjek penelitian yang terlibat secara langsung meliputi:

1. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Kecamatan Warungasem
3. Pemerintah Desa Pandansari.
4. Pengelola Kopal Etom.
5. Masyarakat Desa Pandansari.

1.8.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, yang berupa *purposive sampling*. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, contohnya, informan dianggap memiliki pengetahuan yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dipilih berdasarkan kriteria peneliti untuk mewujudkan keakuratan data yaitu:

1. Maskun, S.E. selaku Kasi Bidang Usaha Pariwisata Disparpora Kab. Batang
2. Ida Purwanti, S.Pd. selaku Kasi Bidang Pemasaran Disparpora Kab. Batang
3. Suwanto, S.E. selaku Kasi PMKS (Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial) Kec. Warungasem
4. Eko Risqianto selaku Kepala Desa Pandansari
5. Aminudin selaku Ketua Kopal Etom
6. Mutrofin selaku Bendahara Kopal Etom
7. Zahrotul Jannah selaku Anggota Kopal Etom
8. Dayati selaku masyarakat Desa Pandansari

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data (informasi) yang diperoleh secara langsung dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui olahan penelusuran data dari lembaga yang berwenang, serta berupa data yang didapat dari buku, literatur, jurnal ilmiah, internet, tabel, bagan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1.8.6 Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau prosedur yang dijalankan peneliti untuk menggali berbagai informasi data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Menurut Creswell (2009) langkah-langkah yang termasuk dalam pengumpulan data melibatkan penetapan batasan penelitian, akuisisi informasi melalui wawancara dan observasi secara terstruktur dan semi terstruktur, serta penggunaan materi visual, dokumen, dan rancangan protokol pencatatan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1.8.6.1 Wawancara

Wawancara menurut Basrowi & Suwandi (2008) merupakan jenis percakapan oleh dua belah pihak dengan tujuan tertentu, kedua pihak tersebut berupa pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan, dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sedangkan menurut Creswell, (2009) dalam proses wawancara peneliti melakukan wawancara melalui tatap muka dengan narasumber, melalui telepon, atau

melakukan wawancara kelompok terfokus yang berisi enam hingga delapan narasumber di masing-masing kelompok. Dalam penelitian ini peneliti menyusun pertanyaan wawancara dengan seksama dan sistematis untuk diajukan kepada narasumber-narasumber yang terkait dalam penelitian.

1.8.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen atau catatan-catatan penting yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga informasi data yang diperoleh lengkap dan tidak berdasarkan pada perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Data dokumentasi untuk penunjang penelitian dapat bersumber dari catatan resmi, dokumen-dokumen ekspresif, serta laporan media massa. Sedangkan menurut Creswell (2009) dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen publik (laporan resmi, surat resmi, dan risalah rapat), dan dokumen pribadi (surat, email, jurnal, dan buku harian).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah usaha peneliti untuk memberikan makna pada data, baik itu berupa teks maupun gambar yang dilakukan secara komprehensif (Creswell, 2009). Menurut Sugiyono (2013), analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan sejak sebelum berada di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Meskipun demikian, penekanan pada analisis data lebih ditekankan selama proses di lapangan, yang secara bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Menurut Creswell (2009), Miles & Huberman (1984) mengemukakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga informasi data yang diperoleh lengkap. Kegiatan analisis data menurut Miles & Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum data atau pengklasifikasian data yang memfokuskan pada informasi yang signifikan. Oleh sebab itu, dari berbagai data yang diperoleh, terdapat data inti yang relevan dipakai untuk penelitian. Proses reduksi data dapat ditingkatkan dengan bantuan alat elektronik seperti komputer, yang memungkinkan pemberian kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui proses reduksi, disusun dalam bentuk uraian singkat, diagram, bagan, hubungan antar kategori, dan format lainnya. Penyajian data biasanya dilakukan melalui penulisan naratif yang sistematis dan mendalam.

3. Pengambilan Kesimpulan

Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, langkah berikutnya adalah pengambilan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, dikenal adanya kesimpulan yang bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ada dukungan bukti yang memadai. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang sejak awal ditentukan, namun bisa juga tidak, tergantung pada data-data yang diperoleh di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui kualitas data dan tingkat keakuratan hasil penelitian, diperlukan adanya uji kredibilitas yang menekankan pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, validitas temuan data dianggap tercapai apabila hasil yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif bersifat kompleks, tidak bersifat tunggal, dan sangat tergantung pada konstruksi manusia. Untuk menguji kredibilitas, penelitian kualitatif dapat menggunakan triangulasi, yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, serta pada berbagai waktu.